



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 195

TAHUN 2017

SERI :

WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN ULE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kota Bima pada umumnya dan Kecamatan Asakota pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan Jatiwangi, dipandang perlu membentuk Kelurahan Ule di Wilayah Kecamatan Asakota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan Ule;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN ULE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bima.
5. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Camat dan bertanggungjawab kepada Camat.
6. Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kota Bima.

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Ule dalam Wilayah Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Pemekaran dari Kelurahan Jatiwangi.

Pasal 3

Kelurahan Ule dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Kelurahan Ule berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Jatiwangi yang terdiri atas:

- a. Lingkungan Mekar Baru;
- b. Lingkungan Kedo;
- c. Lingkungan So Nggela; dan
- d. Lingkungan Tolo Tongga.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kelurahan Ule sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kelurahan Jatiwangi dikurangi dengan wilayah Kelurahan Ule sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Kelurahan Ule adalah 3.273 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kolo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jatiwangi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Melayudan Kelurahan Sarae; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bima.
- (2) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara detail dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penegasan batas wilayah Kelurahan Ule secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pembentukan Kelurahan Ule dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan Kelurahan Ule dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
padatanggal 19 Desember 2017

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
padatanggal 19 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

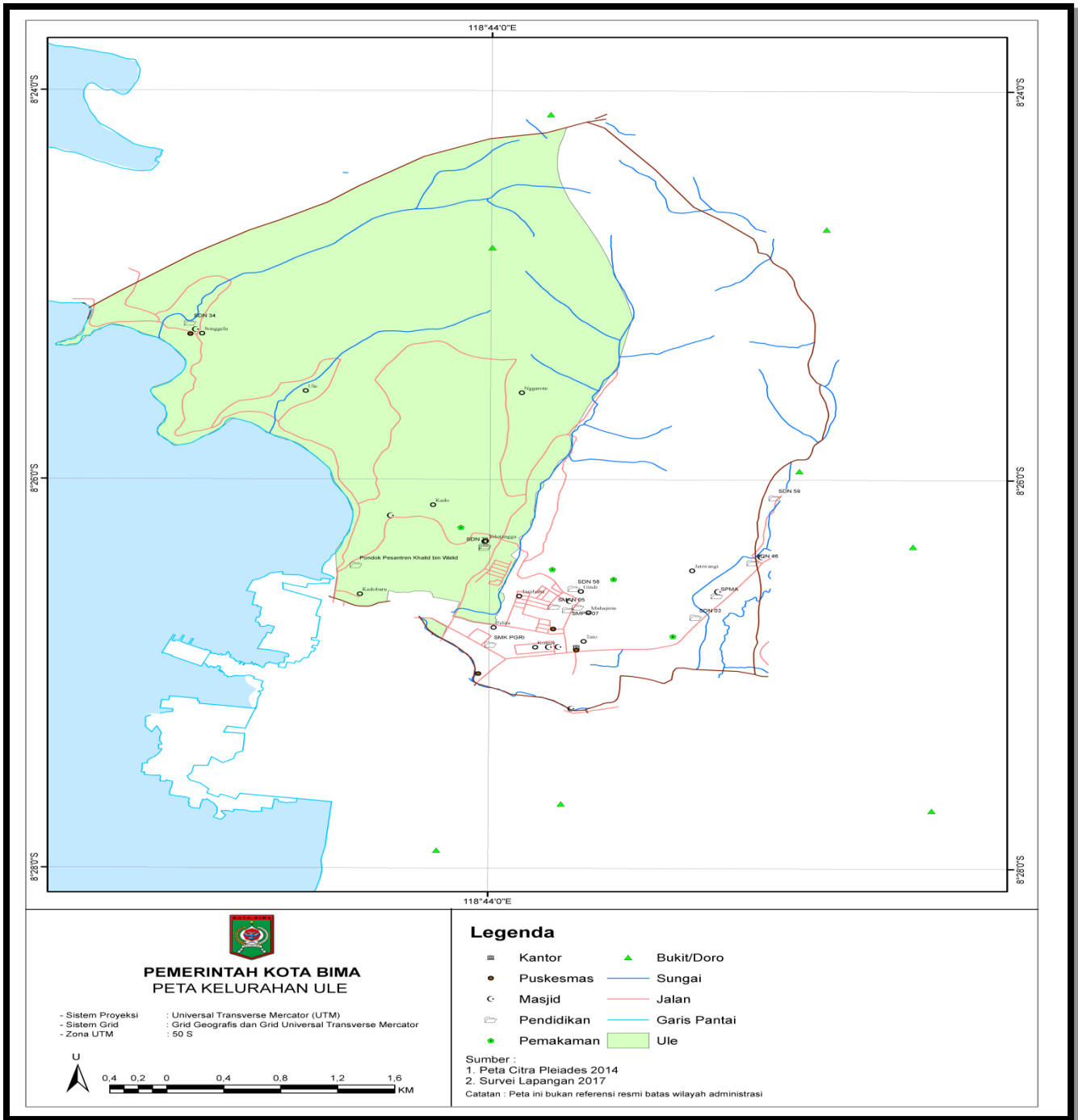
ttd

SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 195
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT:(91/2017)



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN
ULE



WALIKOTA BIMA,

ttd

M.QURAIH H. ABIDIN